BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, dapat disimpulkan mengenai penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 yang mencakup pos-pos sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP 02.

Selanjutnya berdasarkan tujuan dari analisis kinerja anggaran dan pendapatan belanja daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis kinerja anggaran pendapatandaerah dengan realisasinya padaPemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2011-2013 secara umum dapat dikatakan sangat baik. Hanya pada Rasio Derajat Desentralisasi dapat dinilai cukup baik, karena masih menunjukkan angka 51%.
2. Hasil dari analisis kinerja anggaran belanja daerah dengan realisasinya padaPemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2011-2013 secara umum dapat dikatakan baik. Hanya pada Analisis Keserasian Belanja yang dinilai kurang baik, karena Pemerintah Kota Surabaya lebih mengalokasikan sebagian besar belanjanya untuk Belanja Operasi (belanja tidak langsung) daripada Belanja Modal (belanja langsung).
3. Hasil dari analisis kinerja pembiayaan daerah dengan realisasinya padaPemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2011-2013 pada pos SILPA menunjukkan saldo positif, yang berarti pemerintah Kota Surabaya sudah

tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran atau dengan kata lain realisasi SILPA tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan.

5.2 Saran

Setelah mengetahui kesimpulan dari hasil analisis terhadap kinerja realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Kota Surabaya tahun anggaran 2011–2013 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Analisis Rasio Keuanganyang ditunjukkan melalui hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasiyang masih rendah yaitu sebesar 51% pada tahun anggaran 2011-2013, menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya masih kurang dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki. Sebaiknya Pemerintah Kota Surabaya lebih berusaha lagi untuk dapatmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui penggalian potensi-potensidaerah seperti dalam bidang industri yang berbasis sumber daya alam yang masih belum menggunakan tekhnologi tepat guna sehingga perlu adanya pemberdayaan lebih banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu dapat juga melaksanakanpengembangan potensi daerah dengan melakukan intensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada, maupun ekstensifikasi yaitu dengan memperluas lahan pertanian.

2. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal kinerja terhadap keserasian belanja daerah menunjukkan bahwa Pemerintah lebih mengalokasikan sebagian besar belanjanya untuk Belanja Operasi (belanja tidak langsung) daripada Belanja Modal (belanja langsung). Artinya pemerintah lebih memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan daripada untuk pembangunan daerah. Sebaiknya pemerintah tidak hanya memperioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan belanja untuk pembangunan daerah. Atau setidaknya seimbang antara belanja untuk pemerintahan (belanja tidak langsung) dan belanja untuk pembangunan daerah (belanja langsung).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta :Salemba Empat.

Ardon Fridolin Honga. 2014. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Emba Issn 2303-1174*. (Online), Vol.2 hal. 278-288. (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/, diakses 26 Desember 2014)

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya.Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013.

_____,Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012.

_____,Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011.

Indra Bastian.2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Erlangga.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta : UUP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13. Tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta

www.surabaya.go.id/profilpemerintah. Diakses 26 Desember 2014 21:45